1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH (IHK) DAN/ATAU PERKEMBANGAN HARGA BAPOKTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE DEPAN (NON-IHK)

Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk Kabupaten yang menghitung Inflasi namun berperan sebagai penyumbang angka IHK, adapun yang menghitung inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya tiga daerah yaitu Kota Mataram, Kab. Sumbawa dan Kota Bima.

1. Bulan Juli 2026 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M1 mengalami penurunan IPH dengan IPH sebesar -2,14 pada komoditi Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Cabai Merah. Untuk menjaga agar IPH tidak mengalami penurunan yang signifikan TPID Kabupaten Lombok Utara selalu melakukan monitoring ke Pasar-pasar untuk memastikan apakah ada jenis komoditi yang mengalami kenaikan/penurunan harga dan memastikan juga ketersediaan komoditi.
2. Bulan Agustus 2026 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M1 mengalami kenaikan IPH dengan IPH sebesar 1,72 pada komoditi Cabai rawit, Daging Ayam Ras dan Cabai Merah. Untuk mengatasi kenaikan IPH ini, TPID Kabupaten Lombok Utara selalu melakukan monitoring ke Pasar-pasar untuk memastikan kenaikan harga yang terjadi dan memastikan juga ketersediaan komoditi yang mengalami kenaikan pada minggu tersebut.
3. Bulan September 2026 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M4 mengalami kenaikan IPH sebesar 1,07 pada komoditi Beras, Daging ayam Ras, dan Daging Sapi. Untuk mengatasi kenaikan / penurunan IPH yang signifikan TPID Kabupaten Lombok Utara melaksanakan pemantauan harga kebutuhan pokok di 3 Pasar yaitu pasar Pemenang, Tanjung dan Gangga di Kabupaten Lombok Utara.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan IPH komoditas yang kita pantau yaitu komoditas yang mengalami kenaikan itu salah satunya yaitu Cabai Rawit, Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Daging Sapi yang selalu mengalami kenaikan hal ini juga disebabkan seiring dengan faktor musiman yaitu hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 yang memicu tingkat konsumsi yang lebih tinggi sehingga mengalami peningkatan permintaan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Lombok Utara pada Triwulan III tahun 2026, TPID Kabupaten Lombok Utara terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K.

a. Keterjangkauan harga

Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis.

1. Melaksanakan kegiatan monitoring harga sembako dan komoditi strategis secara harian tetap dilakukan dengan lokasi 3 (tiga) pasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu

Pasar Pemenang, Tanjung dan Gangga yang dilakukan oleh enumerator dari Diskoperindag Kabupaten Lombok Utara yang kemudian kontributor dari Diskoperindag memasukkan data harga ke Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
2. Melaksanakan monitoring ke pasar tradisional oleh TPID setiap minggunya dan melaksanakan monitoring pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk menjaga keterjangkaun harga sembako terutama diwaktu menjelang Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 pada tanggal 25 Agustus 2026 dan fenomena El Nino atau kemarau panjang yang tengah terjadi pada periode triwulan III tahun 2026 dengan dengan pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok strategis harian.
4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melakukan pengawalan terkait harga gabah dan jagung serta pemantauan harga stok pangan.

b. Ketersediaan Pasokan

Sehubungan dengan perayaan hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 pada bulan Agustus 2026 dan disertai iklim kemarau panjang atau fenomena El Nino yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk tetap menjaga pasokan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia berkoordinasi dengan PERUM BULOG Kanwil Nusa Tenggara Barat.

c. Kelancaran Distribusi

1. Secara akses jalan masih aman, apapun jenis kebutuhan kita dalam daerah itu defisit, kelancaran distribusi ini menjadi hal yang sangaat penting dalam menjaga inflasi.
2. Kelancaran distribusi akses jalan yang memadai untuk selalu dipastikan, distribusi lancar dah harus selalu di pertahankan.
3. Rencana kedepan akan dibentuk satgas pangan yang akan melaksanakan salah satu kegiatan pos pemantauan kendaraan logistic baik yang keluar dan yang masuk demi menjaga kelancaran arus distribusi.

d. Komunikasi Efektif

1. Mengikuti kegiatan *zoom meeting* Rakor Nasional TPID seluruh Kabupaten/Kota dipimpin langsung Kemendagri RI dan dihadiri oleh beberapa narasumber yang dilaksanakan setiap hari Senin.
2. Telah dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka koordinasi untuk sinkronisasi data, menyamakan presepsi dan memperkuat sinergi antar OPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. TPID Kabupaten Lombok Utara juga berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga terkait rencana program penanaman cabai serentak yang memanfaatkan halaman sekolah untuk menekan kenaikan harga yang sering terjadi pada komoditas Cabai Rawit.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sudah dianggarkan pada perubahan tahun 2026 dan akan dilaksanakan pada triwulan IV sehingga upaya pemerintah daerah Kabupaten

Lombok Utara untuk menyediakan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Di samping itu, TPID Kabupaten Lombok Utara juga tetap menjaga stabilisasi harga pasokan dan harga pangan pokok dengan tetap melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga harga pasar tetap stabil dan tidak mengalami perubahan harga yang fluktuatif.

2. Operasi pasar belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran akan tetapi TPID Kabupaten Lombok Utara tetap menjaga ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara dengan berkoordinasi dengan Perum BULOG dan intansi terkait sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Operasi pasar untuk selalu dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga terjamin ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara.
2. Koordinasi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau Perangkat Daerah Teknis terkait harus diperkuat sehingga terjalin dengan baik agar tidak adanya kegiatan yang bertabrakan jadwal pelaksanaannya.
3. Pentingnya satgas pangan didaerah agar terkait pemantauan harga bisa satu suara.
4. Membuat post pemantauan, agar apa yang masuk dan keluar bisa terinventarisir.
5. Sinkronisasi program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang.